

Kehidupan Sosial Ekonomi PETANI TANPAK (Studi kasus Desa Manakku)

Oleh AMIR TAHAWILA

PENDAHULUAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi di desa Manakku Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, yang jaraknya kurang lebih 60 Km dari Ujung Pandang ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Luas desa ini 18,91 Km² dengan jumlah penduduk 4.325 jiwa pada tahun 1978 dengan kepadatan rata-rata 233 jiwa/Km². Dari luas desa ini 65,87% untuk daerah perempangan, untuk persawahan 28,60%, perkebunan 0,4%, pekarangan/perumahan 3,94%, dan rawa-rawa 1,16%.

Terpilihnya desa Manakku sebagai obyek studi didasarkan atas pertimbangan bahwa : (1) desa ini memiliki potensi tambak yang cukup luas yakni 56% dari luas tambak di Kecamatan Labbak kang, (2) selain memiliki potensi tambak juga ada areal persawahan yang merupakan salah satu sumber hidup dan sebahagian lainnya mata pencaharian penduduk di sektor nelayan. Ini dimaksudkan untuk dapat mengukut perbandingan hasil yang diperoleh dari ketiga jenis mata pencaharian tersebut. Dan (3) sebagian besar (75%) empang di desa Manakku dimiliki oleh golongan bangsawan dan golongan berpunya lainnya dan hanya 25% yang berada di tangan orang biasa. Keadaan ini akan dapat memperlihatkan gambaran kehidupan sosial-ekonomi pemilik tambak, petani penggarap dan buruh tambak.

Dalam pengusahaan tambak di Desa Manakku yang menjadi masalahnya adalah pemilikan tambak tidak merata, teknik pemeliharaan yang belum sempurna dan sistem pemasaran yang tidak efisien.

Dari 189 kepala keluarga (KK) yang memiliki tambak, di antaranya 72 KK yang memiliki 77% dari luas tambak, sedangkan 117 KK hanya memiliki 23% dari luas tambak. Jumlah pemilik tambak ini 15% dari golongan bangsawan yang menguasai 75% dari areal tambak, sedangkan golongan kebanyakan yang jumlahnya 85% hanya memiliki 25% dari areal pertambakan. Tambak yang dimiliki oleh golongan bangsawan ini pada umumnya dikerjakan petani penggarap (non bangsawan) dengan sistem bagi hasil, di mana petani penggarap menerima bagian 20 % sedangkan pemilik menerima bagian 80 % dari hasil produksi.

Kegiatan produksi yang telah dilaksanakan selama ini dengan berpedoman kepada Panca Usaha Perempangan, yakni penggunaan air, pengolahan tanah, pemupukan, pemberantasan hama dan penebaran nener yang optimal belum dilaksanakan secara sepenuhnya. Hal ini disebabkan antara lain ketiadaan modal, sikap penerimaan pemilik dan petani penggarap terhadap teknologi baru yang biasanya mereka tidak mau menerima sesuatu yang baru kalau tidak ada contoh keberhasilan yang dicapai terlebih dahulu. Selain itu pula kurangnya tenaga penyuluh sehingga intensitas kunjungan ke lapangan masih sangat jarang.

Hasil-hasil tambak yang berupa bandeng dan udang harganya selalu bervariasi naik turun. Kebanyakan mereka terperangkap oleh sistem ini pada *punggawa* (golongan yang mempunyai modal uang) yang memberikan pinjaman kepada mereka. Kedudukan lembaga keuangan pemerintah (BRI) yang diharapkan dapat membantu ternyata dapat disisihkan oleh para punggawa karena mereka tidak banyak menuntut persyaratan kredit dibanding dengan BRI. Selain kegiatan-kegiatan yang bersifat koperatif yang disalurkan melalui BUUD/KUD, sampai saat ini nampaknya tidak berhasil menggantikan kedudukan sistem tradisional yang ada. Oleh karena itu, lembaga tradisional ini dianggap sebagai bankir yang dapat memberikan pinjaman kepada petani tambak setiap saat. Dengan demikian para pemberi kredit jauh lebih banyak menentukan keadaan harga daripada petani tambak.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas maka segi yang menarik, dan yang akan menjadi tumpuan utama penelitian ini ada-

lah tentang kehidupan sosial-ekonomi petani tambak yang mencakup pemilik tambak, petani penggarap dan sawi, sampai sejauh manakah tentang keadaan hidup mereka.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mendalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan sosial-ekonomi petani tambak di desa Makkku Kabupaten Pangkep. Dengan penelitian ini disahakan untuk mengetahui bagaimana latar belakang dan gambaran keadaan sosial-ekonomi mereka, rintangan-rintangan apa yang dihadapi dan apa aspirasi-aspirasi yang terkandung dalam diri mereka sendiri. Kemudian sampai sejauh mana pemerintah telah memberikan perhatian terhadap perbaikan kehidupan sosial ekonomi mereka, apa dan sampai sejauh mana pemerintah telah meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan sektor perikanan khususnya tambak, dan apa hasil-hasil yang dicapai dan bagaimana impaknya terhadap kehidupan sosial-ekonomi petani tambak sendiri. Kemudian apa peranan serta potensi yang telah dan seharusnya akan dimainkan oleh para petani tambak dalam rangka pengembangan sektor pertambakan ini, dan bagaimana meningkatkan peranan petani tambak itu.

Prosedur dan Metode Penelitian

Untuk tujuan-tujuan penelitian ini dipergunakan metode studi kasus yang bersifat eksploratif, juga digunakan penelitian uji dan penelitian deskriptif. Ketiga metoda ini digunakan secara bersamaan oleh karena di samping mencari hubungan antara gejala sosial dan hubungan sebab akibat juga menguji hipotesa yang telah dirumuskan dalam permasalahan.

Di dalam pengambilan sampel dipergunakan metode stratified random sampling, karena dalam pertambakan ini ada tiga tingkatan golongan, yakni pemilik tambak, petani pemilik juga sebagai penggarap dan buruh tambak (sawi). Karena sifatnya heterogen maka secara random sampling tidak setepat mungkin mewakili populasi dan mungkin terjadi bias yang besar. Untuk mencegah hal ini maka digunakan cara stratified random sampling agar menjamin bahwa strata-strata tertentu akan masuk ke dalam sampel. Masing-masing strata ini diambil 10% dari jumlah populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi tersebut. Sesuai dengan imbalanced populasi maka sampel yang dapat ditarik yakni : 20 orang untuk buruh tambak, 15

orang petani penggarap dan 9 orang petani tambak.

Untuk memperoleh data primer maka digunakan daftar pertanyaan yang disertai dengan observasi lapangan pada tempat pekerjaan buruh tambak, penyalur bibit dan penyalur ikan bandeng dan udang. Selain itu mengadakan wawancara bebas kepada informan yang mengetahui tentang obyek studi, antara lain Jawatan Perikanan, Kepala Kecamatan Labbakkang, Kepala Desa Manakku dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Untuk melengkapi data primer maka dikumpulkan pula data-data sekunder dari Kantor Desa berupa potensi-potensi desa dan data yang tercatat pada Dinas/Jawatan yang mempunyai kaitan dengan obyek yang diteliti.

HASIL PENELITIAN

Pemilikan tambak

Menurut sejarahnya bahwa tambak di desa Manakku dibuka kira-kira 80 tahun yang silam di bawah pemerintahan Raja Labbakkang yang digelar dengan sebutan *Karaeng Tinggia*. Pada saat itu seluruh tambak merupakan milik raja. Setelah perkembangan selanjutnya sampai saat sekarang sudah 25 % dari areal tambak beralih ke tangan golongan non bangsawan sebagai akibat penjualan para ahli waris.

Pemilikan tambak menurut luas yang dimiliki secara terperinci dikemukakan sebagai tabel berikut :

TABEL 1
Jumlah dan Prosentase Rumahtangga yang memiliki tambak di desa Manakku

Luas penguasaan Ha	Jumlah pemilik KK	%	Luas yang dimiliki Ha	%
0 - 5	117	61,91	287,75	23,16
5 - 10	52	27,51	392,93	31,62
10 keatas	20	10,58	361,84	45,22
Jumlah	189	100,00	1.242,52	100,-

Sumber : Kantor Desa Manakku, data setelah diolah kembali.

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa pemilik yang menguasai 5 hektar ke bawah adalah 62% dengan luas areal yang dimiliki 23%. Yang memiliki 5 s/d 10 hektar adalah 28% dengan luas

pemilikan 32%, sedangkan yang memiliki 10 hektar ke atas 11% dengan luas pemilikan 45%.

Dari jumlah 117 orang pemilik (KK) yang menguasai 5 hektar ke bawah adalah 65% dikuasai oleh golongan kebanyakan dan 35% lainnya dikuasai oleh turunan bangsawan. Pemilik yang menguasai 5 - 10 hektar berjumlah 52 KK di antaranya 83% dikuasai oleh turunan bangsawan dan hanya 17% dikuasai oleh golongan kebanyakan. Sedangkan yang menguasai 10 hektar ke atas adalah 20 KK di antaranya dikuasai oleh golongan bangsawan 95% dan hanya 5% yang dimiliki oleh orang-orang biasa.

Keadaan tersebut di atas mencerminkan bahwa pemilikan tambak tidak merata, segolongan kecil menguasai sejumlah besar areal tambak.

Pengusaha Tambak

1. Sistem Pengolahan

Pengolahan tambak di Desa Manakku baru sekitar 40% luas areal tambak dikerjakan secara intensif, selebihnya pengolahan campuran yakni dengan cara tradisional dan teknik intensifikasi. Masa ini mungkin merupakan waktu peralihan di kalangan petani, sebab mereka tidak secara serentak mengikuti petunjuk teknis hal ini disebabkan antara lain faktor modal dan di samping itu karena kurangnya penyuluhan.

Perluasan tambak dengan membuka hutan nipah dan bakau tidak mungkin lagi karena sudah berbatasan dengan pinggir laut dan pinggir sungai. Ada kecenderungan terjadi intensifikasi yakni dengan mengubah sawah-sawah yang berdekatan untuk dijadikan empang. Semenjak 1976 hingga saat sekarang luas sawah yang telah dijadikan kurang lebih 25 hektar. Luas ini mungkin akan bertambah terus jika prospek pertambakan semakin cerah di masa yang akan datang.

Dengan potensi tambak yang ada sekarang maka untuk meningkatkan produksi harus dilaksanakan intensifikasi sepenuhnya. Intensifikasi dalam arti bahwa sarana-sarana produksi tersedia secara lokal dan harganya dapat dijangkau oleh petani tambak. Selain itu pula untuk menuju usaha intensifikasi ini tidak terlepas dari usaha untuk mengubah konstruksi tambak yang tidak memenuhi persyaratan teknis, misalnya lebar atas pematang hanya 1 meter sedangkan yang seharusnya antara 1,5 dan 2 meter. Juga lebar saluran pembagi sebagian besar antara 2 - 3 meter sedangkan yang seharusnya antara 3 - 5 meter dengan bentuk konstruksi tam-

bak yang memenuhi persyaratan teknis akan dapat mencegah bahaya banjir yang sering terjadi pada waktu musim hujan. Sebaliknya pula hal yang sangat dirasakan oleh petani yang hingga sekarang belum dapat teratasi adalah untuk menanggulangi keadaan air di tambak pada waktu terjadinya musim kemarau. Saat ini sebagian tambak tidak dapat berfungsi dan kering samasekali, dan tambak lain yang juga airnya sudah mengecil, pergantian air sudah tidak teratur yang akhirnya mengakibatkan kematian bandeng dan udang. Masalah ini hanya dapat teratasi bila menggunakan sistem pompanisasi untuk mengalirkan air ke tambak.

Yang merupakan salah satu hambatan dalam proses produksi adalah petakan-petakan yang masih sangat luas, ada 5 - 10 hektar satu petak. Jumlah ini mencapai 65% dari luas empang secara keseluruhan. Petakan empang yang memenuhi persyaratan teknis dan baik dikontrol adalah antara 2 dan 3 hektar. Petakan semacam ini gampang mengatur air masuk-keluar, mudah dikontrol pematang, saluran air keliling dan sebagainya. Sedangkan empang yang sangat luas sangat sulit mengadakan pengontrolan air, bibit yang dihamburkan dan keadaan pematang-pematang. Biasanya di dalam pergantian air tidak secara keseluruhan lama keluar karena jaraknya terlalu jauh, sehingga di tempat ini terjadi pembusukan yang mengakibatkan bibit udang dan bandeng mengalami kematian.

Pengolahan tambak yang dimulai dari pengeringan, pemupukan, pemberantasan hama dan selanjutnya pembuyaran bibit. Dalam hal bibit petani-petani yang kekurangan modal terpaksa mengambil secara kredit bibit bandeng dan udang kepada penyalur yang ada, dengan ketentuan harga akan dibayar duakalilipat dari harga semula setelah panen.

Akibat faktor ini biasanya mereka menebarkan bibit unggul dari ketentuan teknis karena selain membayar ketentuan harga tersebut juga kadang-kadang terjadi kegagalan panen. Sebaliknya bagi petani tambak yang mempunyai modal besar bibit tidak merupakan masalah bagi mereka. Hanya ada kecenderungan karena ingin mencapai hasil produksi yang berlipat ganda nener yang diterbarkan melebihi dari ketentuan teknis yang ada, yang akhirnya bukan kenaikan produksi yang dicapai akan terjadi sebaliknya.

2. Hasil produksi dan sistem bagi hasil

Dengan adanya usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bidang pertambakan maka laju pertumbuhan produksi setiap tahun-

meningkat. Menurut data yang tercatat bahwa produksi bandeng di daerah Kabupaten Pangkep selama Pelita I naik rata-rata 11% per tahun, sedangkan pada Pelita II naik rata-rata 13% per tahun. Khususnya produksi udang di daerah ini nanti berkembang baik pada Pelita II yang rata-rata perkembangannya setiap tahun 94%.

Dari data yang tercatat di Kantor Desa Manakku bahwa produksi bandeng dan udang dari tahun 1974 s/d 1978 perkembangan dapat dilihat sebagai tabel berikut :

Tabel 2
Perkembangan Produksi Udang Windu dan Bandeng di
Desa Manakku Tahun 1974 - 1978

Tahun	Produksi / Ton			
	Bandeng	%	Udang Windu	%
1974	729,96	-	9,81	
1975	862,70	+ 18	24,13	+ 146
1976	1.025,28	+ 19	62,76	+ 160
1977	1.321,44	+ 29	113,25	+ 80
1978	1.297,27	- 2	197,78	+ 85

Sumber : Kantor Desa Manakku 1978, data setelah diolah kembali.

Tabel di atas menunjukkan bahwa produksi bandeng tahun 1978 mengalami penurunan 2%. hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya petani tambak memelihara udang, oleh karena harga udang semakin meningkat sedangkan harga bandeng tetap konstan.

Dalam usaha pertambakan ini ada tiga tingkat golongan yakni : pemilik tambak, petani penggarap dan buruh tambak (sawi). Pemilik tambak adalah mereka yang menguasai sejumlah tertentu tambak yang dikerjakan oleh orang lain dengan sistem bagi hasil. Petani tambak sendiri adalah mereka yang memiliki sejumlah tambak yang dikerjakan sendiri dan di samping itu mengerjakan empang orang lain dengan sistem bagi hasil. Sedangkan buruh tambak adalah mereka yang tidak samasekali memiliki tambak dan mereka semata-mata bekerja untuk menerima upah.

Dari sejumlah 1.243 hektar empang di Manakku, lebih kurang 75% yang dikerjakan oleh orang lain dengan sistim bagi hasil. Pemilik yang memberikan empangnya dikerjakan oleh orang lain berdasarkan keluarga 29%, berdasarkan kenalan 19% dan 52% mereka memberikan empangnya dikerjakan oleh lain karena pertimbangan bahwa orang tersebut samasekali tidak memiliki sawah dan tambak atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Sejak dari dulu hingga sekarang sistem bagi hasil yang berlaku untuk tambak adalah 80% untuk pemilik dan 20% untuk penggarap dari nilai hasil produksi setelah dikurangi seluruh ongkos-ongkos dan pajak (Ipeda).

Untuk mengetahui lebih jelasnya berapa pendapatan yang diterima dan berapa ongkos yang dikeluarkan dari tiga cara pengusahaan tambak, yakni tambak dengan pengusahaan tradisional, pengusahaan tambak secara intensif monokultur bandeng dan tambak intensif polikultur bandeng dan dikemukakan di bawah ini perhitungan biaya operasional yang digunakan dalam pengolahan tambak sebagai berikut :

1. *Tambak Tradisional*

Produksi ikan bandeng rata-rata 300 kg/ha/th. dengan harga Rp.350.-/kg.

Nilai produksi : $300 \times \text{Rp. } 350.- = \text{Rp. } 105.000.-$

Biaya Investasi yakni :

- perbaikan pematang	Rp.15.000,-	
- pintu air	Rp.10.000,-	
- Alat dan saringan	<u>Rp. 5.000,-</u>	Rp. 30.000,-

Biaya operasional yakni :

- bibit 2000 ekor a Rp. 7.50,-	Rp. 15.000,-	
- Ipeda	<u>Rp. 8.500,-</u>	Rp. 8.500
		Rp. 53.500,-

Hasil produksi setelah dikurangi ongkos Rp. 51.500,-

Pendapatan ini : 80 % untuk pemilik Rp. 41.200,-

20% penggarap termasuk sawi = Rp. 10.300,-

2. *Tambak Intensif Monokultur Bandeng*

Produksi ikan bandeng rata-rata 1.250 kg/ha/tahun dengan harga Rp. 350,- per kg. .

Nilai produksi : $1.250 \times \text{Rp. } 350.- = \text{Rp. } 437.500.-$

Biaya Investasi yang terdiri dari : perbaikan pematang/
saluran pintu air, alat perlengkapan dan saringan

Rp. 100.000,-

Biaya operasional yang terdiri dari :

pembelian nener, pupuk dan ba obat-obatan Rp. 159.000,-

Ipeda Rp. 8.500,- Rp. 267.500,-

Hasil produksi setelah dikurangi ongkos = Rp. 136.000,-

Pendapatan ini : 80% untuk pemilik = Rp.136.000,-
 20% penggarap termasuk sawi = Rp. 34.000,-

3. Tambak intensif polikultur udang/bandeng

Produksi udang rata-rata 300 kg/ha/tahun dengan harga Rp.4.500,-/kg. dan bandeng 650 kg/ha/tahun.

Nilai produksi udang : 300 x Rp.4.500,- = Rp. 1.350.000,-

Nilai produksi bandeng 650 x Rp. 350,- = Rp. 227.500,-
 = Rp. 1.577.500,-

Biaya investasi yang terdiri dari :
 perbaikan pematang/saluran keliling,
 perataan peralatan, pemasangan pintu
 air, alat perlengkapan dan saringan

Rp. 130.000,-

Biaya operasional yang terdiri dari :

bibit udang dan bandeng, pupuk, obat-obatan Rp. 394.000,-
 Ipeda Rp. 8.500,- = Rp. 532.500,-

Nilai produksi setelah dikeluarkan ongkos Rp. 1.045.000,-

Pendapatan ini : 80% untuk pemilik = Rp. 836.000,-

20% penggarap termasuk sawi = Rp. 209.000,-

Hasil perhitungan di atas adalah merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh pemilik dan petani penggarap. Dari bagian 20% yang diterima petani penggarap dibagikan lagi kepada beberapa orang sawi (buruh tambak). Sebelumnya diadakan pembagian secara merata dari hasil tersebut, petani penggarap yang merupakan ketua kelompok ia mendapat bagian terlebih dahulu 5% dari hasil pembagian tersebut. Kemudian sisanya dibagi bersama antara petani penggarap (yang merangkap ketua kelompok) dan buruh tambak. Suatu contoh kasus pengolahan tambak yang menggunakan tenaga buruh sebagai berikut : Pemilik tambak bernama DT mempunyai areal tambak seluas 9 hektar yang dikerjakan oleh 3 orang, satu orang bertindak sebagai ketua kelompok dan dua orang lainnya sebagai sawi. Tambak ini dikerjakan secara intensif menokultur bandeng 4 hektar dan polikultur bandeng/udang 5 hektar. Pendapatan yang diperoleh dari masing-masing pengusaha sebagai berikut :

- Pengusaha intensif monokultur bandeng :

4 x Rp. 170.000,- = Rp. 680.000,-

- Pengusahaan intensif polikultur bandeng/udang :

5 x Rp. 1.045.000,- = Rp. 5.225.000,-

Jumlah = Rp. 5.905.000,-

- Pendapatan ini : 80% untuk pemilik = Rp. 4.724.000,-
atau rata-rata pendapatan per bulan pemilik Rp. 393.666
- 20% untuk penggarap termasuk sawi = Rp. 1.181.000,-
- Dikeluarkan 5% untuk ketua kelompok :
5% x Rp. 1.181.000,- = Rp. 59.050,-
- Sisa yang dibagi = Rp. 1.181.000,- - Rp.59.050,- = Rp. 1.121.950,-
- Masing-masing memperoleh :
 $\frac{1}{3}$ x Rp. 1.121.950,- = Rp. 373.983,-
atau rata-rata pendapatan per bulan = Rp. 31.165,-
- Pendapatan Ketua Kelompok :
Rp. 373.983 + Rp. 59.050,- = Rp. 433.033,-
atau rata-rata pendapatan per bulan ketua kelompok (petani penggarap) = Rp. 36.086,-

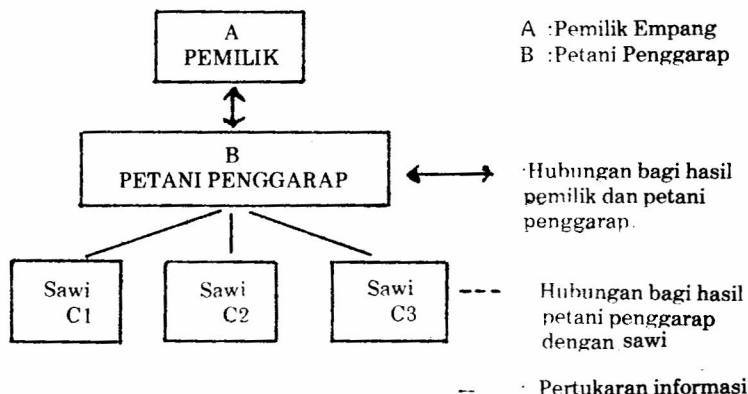
Dari hasil perhitungan intensif monokultur bandeng dan intensif polikultur bandeng kenaikan pendapatan dapat dilihat sebagai berikut :

Pendapatan per tahun :

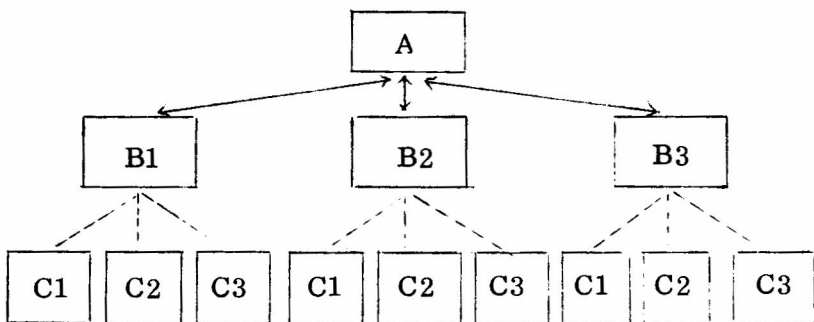
Monokultur bandeng	Polikultur bandeng/ udang	rata-rata kenaikan
- Hasil produksi : Rp. 170.000,-	Rp. 1.045.000,-	600%
- Pemilik 80% : Rp. 136.000,-	Rp. 836.000,-	600%
- Petani penggarap (sawi) 20% : Rp. 34.000,-	Rp. 209.000,-	600%

Selanjutnya dengan sistem bagi hasil ini maka terciptalah hubungan kerja antara pemilik, petani penggarap dan sawi. Hubungan ini digambarkan sebagai berikut :

Skema I.



Skema II : Pemilik mempunyai empang yang luas yang dikerjakan oleh beberapa orang petani penggarap



Hubungan kerja ini melahirkan dua aspek yakni aspek ekonomi dan aspek sosial. Pada aspek ekonomi ditandai dengan sistem bagi hasil yakni 20% untuk petani penggarap dan 80% untuk pemilik. Aspek sosial lahir karena adanya penyerahan wewenang untuk mengerjakan empang. Di sini akan terjadi suatu hubungan tolong menolong di mana petani penggarap sebelumnya tidak mempunyai pekerjaan tetapi dengan cara ini mereka telah mempunyai pekerjaan tetap, bahkan ada yang diserahkan penuh untuk mengurusnya. Dengan cara demikian ini nampaknya memperkuat bangunan sosial di dalam masyarakat.

3. Bantuan Modal

Dengan melihat modal yang merupakan faktor utama dalam usaha-usaha pertambakan di mana dana dengan bantuan BRI yang jumlahnya Rp.10.000,- per hektar hanya dapat membantu tambak ratusan hektar.

Karena keterbatasan dana ini maka pemerintah meminta bantuan dari Bank Dunia sehingga pada akhir Pelita II Jumlah tambak yang mendapat kredit di Kabupaten Pangkep seluas 1.665 hektar, di antaranya yang mendapat bantuan ini di desa Manakku seluas 256 hektar. Bantuan ini bertujuan untuk menyempurnakan konstruksi tambak, memantapkan pelaksanaan Panca Usaha Perempangan dan mengintensifikasi pengelolaan tambak yang diarahkan kepada komoditi ekspor.

Bantuan dari Bank Dunia ini 95 % jatuh pada mereka yang memiliki tambak di atas 5 hektar dan hanya 5 % bantuan ini dinikmati oleh

pemilik tambak yang 5 hektar ke bawah. Padahal kalau dibanding di desa Manakku bahwa pemilikan tambak yang terbanyak pada lima hektar ke bawah yang jumlahnya lebih seratus kepala keluarga sedangkan yang memiliki lima hektar ke atas hanya berkisar di atas 70 kepala keluarga.

Melihat dari kenyataan ini bahwa bantuan semacam ini tujuannya semata-mata hanya untuk melipat gandakan produksi dan tidak bertujuan untuk pemerataan bantuan tersebut. Sehingga akibat selanjutnya bahwa golongan yang mendapat bantuan yang banyak semakin tinggi pula produksi yang ia capai dan sebaliknya bagi mereka yang tidak samasekali mendapat bantuan atau hanya sedikit tentu produksinya akan rendah karena tidak dapat memperbaiki tambaknya.

Selain itu pula bagi mereka yang menerima kredit ada di antaranya tidak menggunakan untuk perbaikan tambak, tetapi dibelikan kendaraan mobil untuk ditrayekkan. Dan di segi lain pula bagi mereka yang menerima hasil panen yang cukup besar biasanya tidak menyisihkan sebagian dananya untuk biaya investasi dan biaya operasional untuk pekerjaan selanjutnya, akan tetapi dibelikan untuk barang-barang kebutuhan sekunder sehingga pada saat tambak dikerjakan sudah ketiadaan modal.

Dan akhirnya mereka meminta bantuan kredit kepada penyalur-penyalur bandeng dan udang (punggawa), dengan ketentuan diperhitungkan setelah panen dengan harga di bawah dari harga yang sebenarnya berlaku di pasaran.

4. Pemasaran

Pada umumnya kegiatan-kegiatan produsen (petani tambak) hanya membatasi diri pada aktivitas produksi dan tidak menangani pemasaran hasil-hasil produksi sampai ke tangan konsumen. Di sini akan timbul lembaga-lembaga pemasaran yang kita kenal dengan istilah *pappalele*, punggawa/pengecer (*pakkalontong*, *pagandeng*).

Di dalam saluran pemasaran hasil produksi tambak (bandeng dan udang) harga kebanyakan ditentukan oleh jalur kedua yaitu lembaga pemasaran.

Transaksi penetapan harga pada mata rantai pertama sudah terjadi semacam ijon yaitu memberikan kredit kepada petani-petani tambak di mana hasil-hasil produksi terutama udang harus dijual kepada mereka dengan ketentuan harga antara 60% - 70% dari harga yang sebenarnya. Nampaknya dalam hal ini kedudukan koperasi untuk

membina para petani tambak terkalahkan oleh punggawa-punggawa yang mempunyai modal besar, sehingga koperasi di daerah ini baik koperasi perikanan laut maupun koperasi perikanan darat tidak dapat berfungsi samasekali.

5. Perbedaan kondisi hidup

Peningkatan hasil produksi yang dicapai selama ini membawa pengaruh yang sifatnya mendorong untuk lebih giat berusaha kembali untuk memperbanyak produksi. Akan tetapi sangatlah disayangkan bahwa kenaikan produksi ini sebagian besar (80%) dinikmati oleh pemilik dan hanya 20% yang jatuh ke tangan petani penggarap.

Perbedaan yang paling nampak dari ketiga golongan ini adalah dari bentuk dan keadaan rumahnya. Dari 9 orang responden pemilik tambak yang mempunyai areal tambak di atas 10 hektar, bentuk konstruksi rumahnya pada umumnya terbuat dari pada tiang kayu, ulih, dinding papan dan atap seng serta di dalam rumah dilengkapi dengan perabot puluhan dan ratusan ribu harganya misalnya lemari, kursi dan masing-masing telah memiliki televisi. Di antara pemilik ini 4 orang yang telah mempunyai mobil yang digunakan untuk trayek dan 5 orang lainnya telah memiliki sepeda motor.

Petani penggarap yang dikuasakan penuh oleh pemilik untuk mengatur kegiatan produksi, tingkat hidupnya berada di atas dari pada buruh tambak (sawi). Bentuk rumah mereka sudah sebagian besar menggunakan dinding papan dan seng dan rata-rata belum mempunyai perabot yang ratusan ribu harganya. Selanjutnya kedudukan sawi yang berada pada anak tangga yang di bawah, pendapatan yang diterimanya 90% untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan hanya 10% yang disisihkan untuk perbaikan rumah mereka. Dari 20 orang responden sawi, 90% rumahnya masih terbuat dari dinding bambu dan atap nipah dan 10% lainnya campuran antara atap seng dengan atap nipa atau bambu.

Sebagai salah satu akibat kenaikan produksi ini kedudukan pemilik yang sebagian besar bangsawan akan tetap dipandang sebagai orang yang terhormat. Mereka dianggap sebagai pemberi nafkah untuk kebutuhan hidup penggarap dan sawi, sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa, misalnya untuk menuntut pembahagian hasil yang lebih besar. Namun demikian, gaya kepemimpinan pemilik yang pada umumnya bersifat paternalistik selalu memperhatikan nasib bawahannya, walaupun dalam hal ini sebenarnya sudah terjadi suatu penghisapan tenaga kerja.

6. Perbandingan sistem bagi hasil tambak, sawah dan nelayan

Mengenai sistem bagi hasil tambak, sawah dan nelayan kecil yang diterima oleh petani penggarap dan sawi. Tetapi kenyataannya para petani penggarap tetap saja menerimanya, malahan mereka berusaha sebaik mungkin mengolahnya agar tidak dialihkan kepada pekerja lain.

Jika dibandingkan dengan produksi yang diterima oleh nelayan sawi yang rata-rata menerima bagian 33,33%, petani penggarap sawah 50%, maka porsi yang diterima oleh petani penggarap tambak termasuk sawi di bawah sekali yakni 20% dari hasil produksi setelah dikurangi seluruh ongkos.

Untuk memperoleh gambaran pendapatan yang diterima oleh nelayan dan petani sawah dikemukakan kasus berikut :

Nelayan :

Dari hasil penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara 7 orang nelayan di pulau Salemo, yang menggunakan perahu motor dengan peralatan jaring dan 3 orang sawi maka pendapatan mereka rata-rata setiap bulan setelah dikurangi ongkos sebanyak Rp.200.000,-. Dari hasil ini dikeluarkan untuk perahu 2 bagian, motor 2 bagian, jaring 1 bagian, lampu strongking 1 bagian (semuanya ini adalah milik punggawa) dan 3 orang nelayan sawi 3 bagian. Dari hasil ini masing-masing memperoleh bagian sebagai berikut :

- Punggawa : $6/9 \times \text{Rp.}200.000,-$ = Rp. 133.333,33
- Sawi : $3/9 \times \text{Rp.}200.000,-$ = Rp. 66.666,66
- Masing-masing sawi memperoleh = Rp. 22.222,22

Sawah Tadah Hujan :

Dari hasil wawancara dengan 7 orang petani pemilik sawah dari yang memiliki 3 ha s/d 10 ha ke atas yang dikerjakan oleh orang lain dengan sistem bagi hasil, diperoleh rata-rata produksi 1,5 ton per hektar. Dengan sistem bagi hasil yang didasarkan atas tesang maka bagian penggarap yang mengolah 1 hektar sawah adalah 750 Kg. Jika kemampuan setiap keluarga petani penggarap sawah 2 hektar maka hasil yang diperoleh 1.500 Kg kg. beras tiap satu kali tanam (setahun). Nilai riil hasil produksi ini dengan penjualan Rp.150,-/kg. diperoleh sebanyak Rp.225.000,- Inilah yang merupakan pendapatan yang diperoleh petani penggarap selama satu tahun atau dalam sebulan sama dengan Rp. 18.750,-

Dari hasil analisa di atas maka diperoleh perbandingan pendapatan setiap bulan sebagai berikut :

- Nelayan sawi = Rp. 22.222,22
- Petani penggarap sawah = Rp. 18.750,-
- Buruh tambak = Rp. 31.165,-
- Petani penggarap tambak = Rp. 36.086,-

Setiap nelayan sawi, petani penggarap, sawah dan petani penggarap tambak termasuk sawi bahwa rata-rata setiap keluarga terdiri dari 5 orang. Pendapatan per orang per hari dari setiap keluarga ini adalah sebagai berikut :

- Nelayan : Rp. 150,- per hari
- Petani penggarap sawah : Rp. 125,- per hari
- Buruh tambak : Rp. 210,- per hari
- Petani penggarap tambak : Rp. 240,- per hari

Perbandingan di atas menunjukkan bahwa walaupun porsi yang diterima oleh petani penggarap tambak termasuk sawi paling kecil akan tetapi sebaliknya nilai riil yang mereka terima jauh lebih besar daripada pendapatan nelayan sawi dan petani penggarap sawah. Inilah yang mungkin merupakan alasan ekonomisnya sehingga petani penggarap (sawi) tambak tidak mau meninggalkan pekerjaannya walaupun bagian yang mereka terima lebih kecil dibanding dengan bagian pemilik. Dari alasan ekonomis ini akan memperkuat keterikatan antara pemilik tambak dan penggarap. Kedudukan pemilik akan nampak sebagai patron dalam arti pemberi segala kebutuhan hidup penggarap dan sebaliknya petani penggarap akan tetap merupakan sebagai klien untuk melaksanakan pekerjaan.

KESIMPULAN

Perbedaan luas pemilikan tambak di desa Manakku adalah disebabkan karena latar belakang sejarah di mana pada saat itu tambak-tambak yang dibuka semuanya merupakan milik raja.

Setelah perkembangan selanjutnya sampai saat sekarang pemilikan yang sepenuhnya oleh golongan bangsawan telah beralih sebagian kecil ke tangan golongan orang biasa. Pengalihan ini sebagai akibat terjadinya transaksi penjualan dari ahli waris turunan bangsawan. Namun demikian hingga kini masih 75% dari luas empang dikuasai oleh golongan bangsawan.

Nampaknya sekarang bagi para pemilik tambak, baik bangsawan maupun pemilik yang berasal dari golongan biasa sudah jarang mereka melakukan transaksi penjualan tambak secara tunai. Hal ini mungkin disebabkan karena harga hasil produksi tambak terutama udang semakin meningkat. Dan mungkin juga mereka ber-

anggapan bahwa dengan pemilikan tambak yang luas selain untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan kedudukan dalam masyarakat juga merupakan harta yang akan diwariskan kepada anaknya nanti.

Pelaksanaan pekerjaan tambak ini ada yang dikerjakan sendiri oleh pemilik dan mereka ini umumnya dari golongan biasa, sedangkan sebagian besar tambak diberikan oleh orang lain untuk mengerjakannya dengan sistem bagi hasil. Pada umumnya mereka menyerahkan empangnya dikerjakan oleh orang lain adalah mereka yang berasal dari turunan bangsawan dan golongan berpunya lainnya. Pemberian pekerjaan ini kepada seseorang adalah terutama melihat faktor keuletan, kemampuan dan kejujuran.

Selain melihat faktor tersebut pemberian ini didasarkan pula atas pertimbangan rasa kemanusiaan untuk saling membantu sesamanya. Dari sejumlah pemilik tambak 52% yang menyerahkan empangnya dikerjakan oleh orang lain (petani penggarap) yang tidak mempunyai tambak ataupun sawah atau pekerjaan lainnya. Pertimbangan pemberian ini mungkin juga melihat dari segi produktivitasnya, sebab bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan lain kemungkinan besar ia bekerja lebih bersungguh-sungguh.

Sistem bagi hasil yang selama ini berlaku adalah 80% bagian untuk pemilik dan 20% untuk petani penggarap termasuk sawi setelah dikeluarkan seluruh ongkos-ongkos. Pada waktu pemeliharaan monokultur bandeng pendapatan yang diterima oleh pemilik dan terutama petani penggarap dan sawi adalah relatif rendah oleh karena harga bandeng tidak seberapa (Rp. 350,-). Akan tetapi dengan adanya usaha polikultur bandeng dan udang di mana harga udang jauh lebih tinggi (Rp. 4.500/kg) maka pendapatan mereka rata-rata naik 600%. Namun walaupun mengalami kenaikan produksi yang sangat tinggi, sistem bagi hasil yang demikian ini akan jelas kenaikan taraf hidup petani penggarap dan sawi lebih lambat jika dibanding dengan pemilik. Perbedaan yang paling nampak kita lihat bahwa umumnya pemilik tambak memiliki rumah-rumah baik menurut ukuran desa yakni beratap seng dan berdinding papan, sedangkan petani penggarap dan sawi sebahagian besar rumah mereka masih terbuat dari dinding bambu dan atap nipah.

Pada akhir-akhir ini dengan meningkatnya produksi udang dan dengan harga yang cukup lumayan maka jumlah pendapatan yang diterima oleh petani penggarap dan sawi jauh lebih besar bila dibanding dengan pendapatan petani penggarap sawah (sawah tadah hujan). Hal ini diduga pula berlaku bagi petani penggarap

(sawi) pada daerah-daerah tambak di Kabupaten Pangkep bahkan di daerah-daerah tambak di Sulawesi Selatan.

Peningkatan hasil produksi tambak disebabkan karena adanya sistem pertambakan dengan menggunakan konsep Panca Usaha Perempangan. Sampai saat sekarang penerapan Panca Usaha ini di desa Manakku baru berkisar 40% areal tambak yang mengikutinya dan selebihnya empang dikerjakan secara campuran artinya masih pula menggunakan cara tradisional juga sudah mengambil sebahagian teknik-teknik baru. Jika seandainya usaha untuk menerapkan panca usaha perempangan secara sepenuhnya maka hasil akan berlipat kali, dengan demikian pendapatan petani tambak akan semakin meningkat.

Masalah utama dalam penerapan panca usaha ini adalah karena ketiadaan modal. Namun sebenarnya jika petani tambak (pemilik) menyisihkan sebagian dari pendapatan ini untuk kebutuhan investasi tambak niscaya tidak terlalu mengalami kesulitan. Akan tetapi mereka lebih mengutamakan untuk membeli barang-barang kebutuhan sekunder. Di lain hal pula bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah yang berupa kredit Bank sebagian besar jatuh di tangan yang memiliki empang yang luasnya di atas 5 hektar dari pada mereka yang memiliki areal tambak 1 s/d 5 hektar. Pada hal justru pemilik tambak ini adalah 62% dari jumlah pemilik tambak. Oleh karena itu jalan yang harus ditempuh untuk membiayai usaha tambak dengan mengambil kredit pada golongan-golongan berpuanya di dalam masyarakat. Pemberian bantuan ini diikat dengan suatu perjanjian bahwa hasil produksi terutama udang harus dijual kepada mereka. Karena tidak berbelit-belitnya pengambilan kredit ini maka pemilik tambak sebagian besar meminta kredit kepada si punggawa. Si punggawa ini telah memasang agen-agennya di mana-mana sehingga mereka dapat menguasai produksi udang secara keseluruhan.

Dapatlah dikatakan bahwa secara tidak disadari pemilik tambak telah terperangkap oleh sistem ijon, oleh karena kebanyakan mereka kredit bukan hanya semata-mata untuk tujuan investasi akan tetapi juga untuk kebutuhannya sehari-hari sehingga panen satu dua bulan lagi sudah mengambil kredit.

Dari analisa yang dikemukakan di atas bahwa pemilik tambak adalah tergantung dari punggawa dan selanjutnya petani penggarap (sawi) tergantung dari pemilik tambak. Jadi pemilik tambak adalah merupakan klien punggawa dan sebaliknya ia merupakan patron dari petani penggarap.

Dengan adanya lembaga tradisional ini yang mengikat antara satu dengan lainnya dan saling membutuhkan sesamanya maka lembaga koperasi yang datangnya dari atas (pemerintah) tidak dapat berfungsi samasekali.

